



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di banyak negara demokrasi pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pemilihan umum (pemilu) sebagai pilar demokrasi di Indonesia, telah diatur dan dijelaskan pada UUD 45 Pasal 22E, yaitu: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Budiardjo, 2008:461). Pemilu tidak saja memilih Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau seringkali disebut Pilkada. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Pada awal September 2014 ini telah tersiar wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pemilihan Kepala Daerah, yang tadinya pemilihan Kepala Daerah langsung menjadi tidak langsung (melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD). Rancangan ini mulanya diajukan oleh pemerintah, karena merasa sering terjadi tindak pidana korupsi oleh kepala daerah serta kurangnya dukungan bupati, walikota, gubernur terhadap program Presiden. Sehingga program kerja Presiden kurang efektif.

Menurut website BBC Indonesia, dengan adanya usulan perubahan ini tentu menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik masyarakat maupun pihak politisi. Dalam pihak politisi, terdapat perbedaan pendapat antara KMP dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat), dapat dilihat dari jumlah anggota partai sebanyak 560 kursi, KMP yang mendukung pilkada tidak langsung unggul memiliki 420 kursi, dan KIH yang mendukung pilkada langsung memiliki 140 kursi, dapat dilihat dari rincian tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Anggota KMP dan KIH**

<b>PRO</b>		<b>KONTRA</b>	
<b>KIH</b>	<b>Kursi</b>	<b>KMP</b>	<b>Kursi</b>
PKB	27	Gerindra	26
Hanura	18	PKS	57
PDIP	95	PAN	43
		PPP	37
		Golkar	107
		Demokrat	150
<b>Jumlah</b>	<b>140 (25%)</b>		<b>420 (75%)</b>
<b>TOTAL: 560 Kursi (100%)</b>			

Terdapat pula pendapat dari pengamat politik, Ray Rangkuti dalam detik.com. Perbedaan pilihan saat sidang paripurna DPR RI terkait RUU Pilkada terjadi antara partai-partai KMP dan KIH. Namun, pertarungan sebenarnya di

sidang itu terjadi antara KMP dan rakyat. "Sebetulnya yang terjadi bukan persaingan antara KMP dan (Koalisi) Indonesia Hebat. Tanggal 26 itu adalah kekalahan rakyat Indonesia terhadap KMP. Jadi KMP bisa disebut melawan kehendak rakyat Indonesia".

Pernyataan di atas didukung dengan penelitian dari, LSI Adjie Alfaraby menyebutkan sebanyak 81,25 persen responden memilih agar pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah berjalan selama 9 tahun terakhir ini tetap dipertahankan. Dan sisanya 18,75 persen setuju dengan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Pro kontra yang terus bergulir menyita perhatian media, terbukti dari berita yang disampaikan oleh Republika *online* bahwa ekspose tertinggi pembicaraan RUU Pilkada terjadi pada bulan September, dengan 8.490 pemberitaan.

Dalam konteks ini, media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam proses politik menurut Lichtenberg dalam (Cangara, 2009:117). Besarnya perhatian media terhadap fenomena ini tidak mengherankan karena peristiwa ini mempunyai nilai berita yang tinggi. Sebuah peristiwa atau isu dikatakan sebagai berita jika mengandung nilai berita. Menurut Ishwara (2005:53-58) nilai berita ini menjadi ukuran yang berguna, atau yang biasa diterapkan, untuk menentukan layak berita (*newsworthy*). Peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita ini misalnya yang mengandung konflik, bencana, dampak, kemasyuran, segar dan kedekatan, keganjilan, *human interest*, seks, dan nilai-nilai yang lainnya.

Pembahasan RUU Pilkada terdapat beberapa nilai penting yang terkandung, yang pertama aktual, yaitu: pembahasan RUU pilkada menjadi berita hangat dalam perbincangan apakah akan tetap secara langsung atau tidak langsung yang akan diumumkan pada sidang paripurna tanggal 25 September 2014. Selanjutnya nilai lain yang penting adalah konsekuensi, yaitu: memiliki dampak pada skala nasional tentang hasil pembahasan RUU pemilihan kepada daerah.

Media telah menjadi aktor utama dalam bidang politik (Cangara, 2009:117). Penilaian tersebut dirasakan benar dengan kehadiran media massa yang telah mewarnai perpolitikan di Indonesia. Para pemilik media telah menjadi aktor dalam bidang politik, dengan cara ikut terjun langsung ke dunia politik.

Menurut pengamatan awal penulis, Koran Seputar Indonesia milik Hary Tanoesoedibjo yang salah seorang anggota dari KMP memuat berita mengenai keberpihakan pada pilkada tidak langsung. Sedangkan Koran Kompas dengan pendiri Jacob Oetama dan Auwjong Peng Koen yang bukan siapa-siapa di dunia politik dan tidak terbebani oleh masalah-masalah politik. Sehingga dapat dilihat dari latar belakang kepemilikan masing-masing media, membuat konstruksi isu RUU Pilkada jadi kian beragam.

Penelitian Konstruksi berita polemik tentang Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan Kepala Daerah pada Koran Sindo dan Koran Kompas yang akan dilakukan, menggunakan metode analisis framing. Menurut Eriyanto, (2002:7-10) peristiwa yang sama bisa jadi dibingkai secara berbeda oleh media. Oleh karena itu Metode analisis framing merupakan metode analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing

menafsirkan makna dari suatu teks dengan jalan menguraikan bagaimana media membingkai isu.

Metode framing yang penulis gunakan ialah metode yang dirancang oleh Zhongdang Pan dan Kosicki. Pertimbangan penggunaan metode Zhongdang Pan dan Kosicki karena berita diteliti terdapat unsur retorik sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Seperti halnya yang ditemukan pada Koran Sindo terdapat info mengenai dampak buruk pilkada langsung dan pada Koran Kompas dampak buruk pilkada tidak langsung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi media massa tersebut dapat kita ketahui setelah kita mengetahui framing masing-masing berita yang mereka cetak. Maka dengan adanya penelitian framing ini akan diungkapkan secara mendalam mengenai isu utama yang ingin dikemukakan oleh Kompas maupun Sindo. Isu itu tentu saja yang berkaitan dengan berita Polemik RUU Pilkada.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana Koran Sindo dan Koran Kompas membingkai berita polemik tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tanggal 19 September – 25 September?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pembedaan berita yang dilakukan oleh Koran Sindo dan Koran Kompas tentang polemik Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tanggal 19 September – 25 September.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

1. Memberikan manfaat bagi peneliti dalam menerapkan disiplin ilmu komunikasi tentang analisis pembingkai.
2. Mengembangkan kemampuan tentang ilmu pengetahuan dan perkembangan metode pembingkai suatu media.
3. Memahami latar belakang pemberitaan di media massa.

### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

1. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan bahwa berita merupakan fakta atau kejadian yang dikonstruksi dan dibingkai oleh media.
2. Sebagai gambaran secara jelas mengenai pembingkai terhadap berita polemik RUU Pilkada pada Koran Kompas dan Koran Sindo.
3. Menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian media yang berkaitan dengan analisis framing di masa yang akan datang.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian yang menggunakan analisis framing sejauh ini telah banyak dilakukan, namun yang paling banyak diteliti dengan analisis framing adalah media cetak, dalam hal ini surat kabar. Hal ini terlihat dari penelitian terdahulu seperti uraian di bawah ini:

Widya Victoria M (2007) dengan judul Pemberitaan Pers Tentang Pilkada DKI Jakarta 2007 (Analisis Framing Pemberitaan Harian Umum Kompas dan Republika Edisi Tanggal 4 Juli – 4 Agustus 2007). Tujuan dari penelitian ini berupaya membuat pemetaan lugas keberpihakan surat kabar nasional terhadap realitas sosial lewat dinamika framing. Metode yang digunakan dalam dua tahap, pertama: data tekstual secara kuantitatif digunakan agar dapat menentukan *core frame* penelitian ini dan kedua menggunakan metode analisis framing model Gamson dan Modigliani yang merupakan tradisi dari analisis wacana. Dan hasil dari penelitian ini terbukti bahwa keberpihakan berbeda diperlihatkan secara jelas oleh masing-masing media. Koran Kompas yang terkesan imbang berusaha menunjukkan arti penting proses demokrasi. Sedangkan Koran Replubika yang secara informatif dan kritis dalam pemberitaannya, cenderung memandang peristiwa pilkada DKI Jakarta 2007 sebagai suatu proses pembelajaran politik.

Perbedaan penelitian oleh Widya terdapat pada media yang dibandingkan, media yang digunakan oleh Widya adalah Kompas dan Republika, sedangkan